

## **BPK Temukan Penyimpangan TPP Harlep**

**SEMARANG-** Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Jateng tahun 2014 berpotensi besar merugikan keuangan negara. Sebab, ada tenaga harian lepas (Harlep) yang tidak



**Rukma Setyabudi**

■ Baca BPK .hal 7

## **BPK Temukan**

**dari hal 1**

berhak mendapatkan ternyata diberi TPP oleh Pemprov Jateng.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, ketika dikonfirmasi hasil konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, Selasa (14/7). Konsultasi dilakukan oleh empat pimpinan DPRD Jateng yang dipimpin langsung oleh Rukma Setyabudi.

"Sebelum Lebaran kita sudah melakukan konsultasi ke BPK, terkait dengan APBD Jateng tahun anggaran 2014. Yang agak berat adalah persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang merugikan keuangan negara. Sebab, ada yang tidak berhak (Tenaga Harlep, *red*) diberi TPP oleh Pemprov," ungkapnya, kemarin.

Menurut Rukma, selain persoalan TPP juga dibicarakan beberapa hal lain. Diantaranya adalah kegiatan mendahului anggaran perubahan APBD TA

2014. Masing-masing di Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Cipta Karu.

Dimana kegiatan mendahului anggaran di ketiga dinas tersebut ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, datanya tidak disajikan oleh Pemprov Jateng. Hal itu juga diakui Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo, pada saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng.

"Tapi menurut Kepala BPK RI, untuk kegiatan mendahului anggaran ini, kalau dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ditemukan penyimpangan, maka tidak menjadi masalah," tambah Rukma.

Lebih lanjut disampaikan Rukma, dari hasil konsultasi Pimwan tersebut, diketahui bahwa BPK RI sekarang telah menindaklanjuti permintaan DPRD untuk melakukan pemer-

iksaan lebih lanjut terhadap APBD Jateng TA 2014.

Pemeriksaan sekarang sudah berjalan. Nantinya, 60 hari kedepan BPK RI akan menyampaikan perkembangannya. Kalau belum selesai, sesuai aturan akan diberi tambahan waktu 30 hari untuk melanjutkan pemeriksaan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan adanya penyimpangan dalam pemberian TPP sebelumnya juga disuarakan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

Pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng segera melakukan penyidikan terhadap kasus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Jateng tahun 2014. Terkait kasus TPP yang menjadi sorotan masyarakat itu, Kejati tidak perlu menunggu lapran dari masyarakat. **(udi/muz)**